

HASIL KESEPAKATAN TIM KECIL PANITIA AD HOC I
Tanggal 5 September 2001

BAB I
ALTERNATIF 1 :
BENTUK DAN KEDAULATAN
ALTERNATIF 2 :
BENTUK, DASAR, DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (Tetap)

(2) **Alternatif I :**

Dasar negara adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Alternatif II :

Tidak perlu dicantumkan dalam pasal.

(3) **Alternatif 1 :**

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Alternatif 2 :

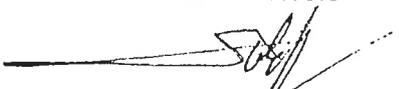
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(4) **Alternatif 1 :**

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Alternatif 2 :

Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis.

PIMPINAN RAPAT TIM KECIL					
 Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si					
Fraksi PDIP, Drs. Suljipno	Fraksi P. Golkar, Dr. Happy Bone Z.	Fraksi PPP, Drs. Lukman Hakim Saiuddin	Fraksi KB, KH. Yusuf Muhammad, Lc	Fraksi Reformasi, Ir. A.M. Luthfi	
Fraksi PBB,	Fraksi PDU,	Fraksi TNI/Polri,	Fraksi LDC,	Fraksi KKI,	Fraksi PDKB,

**HASIL KESEPAKATAN
TIM KECIL PAH I BADAN PEKERJA MPR RI
Tanggal 10 September 2001**

**BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2**

(1) Alternatif 1 :

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan utusan golongan yang diatur menurut ketentuan undang-undang.

Alternatif 2 :

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

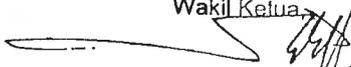
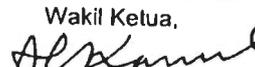
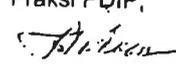
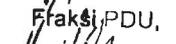
Pasal 3

Tugas, wewenang, dan hak MPR ialah :

- 1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- 2) **Alternatif 1 :**
Menetapkan haluan negara dalam garis-garis besar.

Alternatif 2 :

Tidak perlu menetapkan haluan negara dalam garis-garis besar.

PIMPINAN TIM KECIL TENTANG BAB II MPR					
 Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. Slamet Effendy Yusuf, MSI		Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		Sekretaris,  Drs. Ali Masykur Musa, MSI	
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar,  Ir. H. Rully Chairul Azwar	Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  Andi Najmi Fuadi, SH	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M Luthfi	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH
Fraksi PDU, 	Fraksi KKI, 	Fraksi PDKB, 	Fraksi TNI/POLRI, 	Fraksi UG, 	

3) Alternatif 1 :

Memilih dan menetapkan dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih secara langsung oleh rakyat.

Alternatif 2 :

Menetapkan dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden dari dua partai politik pemenang pemilihan umum untuk dipilih secara langsung oleh rakyat.

Alternatif 3 :

memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum.

Alternatif 4 :

Tidak perlu alternatif 1, 2, dan 3.

- 4) Menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dari jabatannya karena [pelanggaran sumpah jabatan atau] pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

PIMPINAN TIM KECIL TENTANG BAB II MPR

Jakob
Drs. Jakob Tobing, MPA

Wakil Ketua, <i>Slamet</i> Drs. Slamet Effendy Yusuf, MSi			Wakil Ketua, <i>Harun Kamil</i> Harun Kamil, SH		Sekretaris, <i>Ali Masykur</i> Drs. Ali Masykur Musa, MSI
Fraksi PDIP, <i>Siahaan</i> Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi Golkar, <i>Chairul</i> Ir. H. Rully Chairul Azwar	Fraksi PPP, <i>Lukman Hakim</i> Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB, <i>Najmi Fuadi</i> Andi Najmi Fuadi, SH	Fraksi Reformasi, <i>A.M Luthfi</i> Ir. A.M Luthfi	Fraksi PBB, <i>Hamdan Zoelva</i> Hamdan Zoelva, SH
Fraksi PDU, <i>Muhammad</i>	Fraksi KKI, <i>...</i>	Fraksi PDKB, <i>...</i>	Fraksi PAN/POLRI, <i>...</i>	Fraksi UG, <i>...</i>	

1

**HASIL KESEPAKATAN
TIM KECIL PAH I BADAN PEKERJA MPR RI
Tanggal 11 September 2001**

**BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA**

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (Tetap)
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. (Tetap)

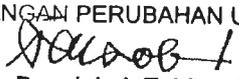
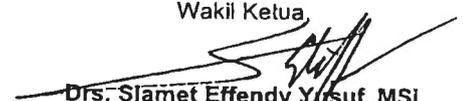
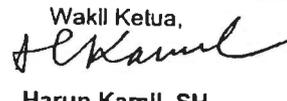
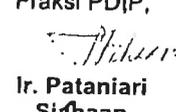
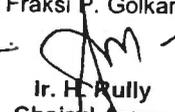
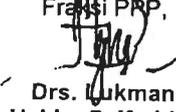
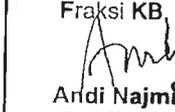
Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (*Perubahan Pertama*)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (Tetap)

Pasal 6

Alternatif 1 :

- (1) Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

PIMPINAN TIM KECIL PEMBAHASAN BAB III RANCANGAN PERUBAHAN UUD 1945  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua  Drs. Slamet Effendy Yusuf, MSI		Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		Sekretaris,  Drs. Ali Masykur Musa, MSI	
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Sjaahan	Fraksi P. Golkar,  Ir. H. Pully Chairul Azwar	Fraksi PRP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  Andi Najmi Fuadi, SH	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M Luthfi	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH
Fraksi PDU.	Fraksi KKI.	Fraksi PDKR	Fraksi TAMPOLRI	Fraksi	Fraksi

Alternatif 2 :

Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dihukum pidana penjara dan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

PIMPINAN TIM KECIL PEMBAHASAN BAB III RANCANGAN PERUBAHAN UUD 1945					
Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua		Wakil Ketua		Sekretaris	
Drs. Slamet Effendy Yusuf, MSI		Harun Kamil, SH		Drs. Ali Masykur Musa, MSI	
Fraksi PDIP, Ir. Pataniari Sahaan	Fraksi P. Golkar, Ir. H. Rully Chairul Azwar	Fraksi PPP, Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB, Andi Najmi Fuadi, SH	Fraksi Reformasi, Ir. A.M Luthfi	Fraksi PBB, Hamdan Zoelva, SH
Fraksi PDU,	Fraksi KKI,	Fraksi PDKB,	Fraksi TNI/POLRI,	Fraksi UG,	

**HASIL KESEPAKATAN
TIM KECIL PAH I BADAN PEKERJA MPR RI
Tanggal 12 September 2001**

ALTERNATIF I :

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat.
- (2) Paket-paket calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di masing-masing provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, disahkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

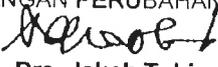
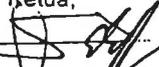
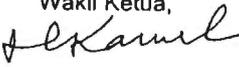
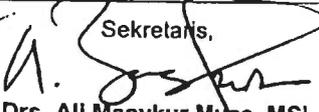
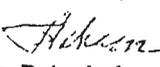
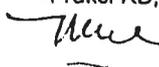
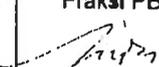
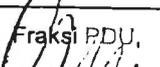
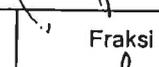
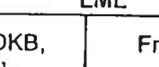
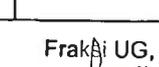
(4) **Alternatif 1 :**

Dalam hal tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan paket yang memperoleh suara terbanyak untuk disahkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Alternatif 2 :

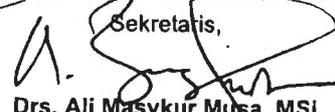
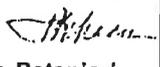
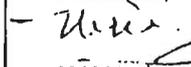
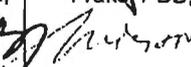
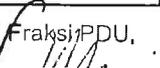
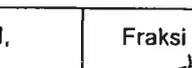
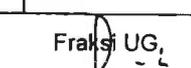
Dalam hal tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh rakyat secara langsung dan paket yang memperoleh suara terbanyak disahkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

PIMPINAN TIM KECIL PEMBAHASAN BAB III RANCANGAN PERUBAHAN UUD 1945					
 Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. Slamet Effendy Yusuf, MSI		Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		Sekretaris,  Drs. Ali Masykur Musa, MSI	
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar,  Dr. Happy Bone Zulkarnaen	Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  K.H Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M. Lubis	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH
Fraksi PDU, 	Fraksi KKI, 	Fraksi PDKB, 	Fraksi TNI/POLRI, 	Fraksi UG, 	

ALTERNATIF II :**Pasal 6A**

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat.
- (2) Paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menetapkan dua paket yang mendapat suara terbanyak.
- (3) Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara electoral terbanyak.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang.

PIMPINAN TIM KECIL PEMBAHASAN BAB III RANCANGAN PERUBAHAN UUD 1945  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. Slamet Effendy Yusuf, MSI		Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		Sekretaris,  Drs. Ali Masykur Musa, MSI	
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar,  Dr. Happy Bone Zulkarnaen	Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Salfuddin	Fraksi KB,  K.H Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M Luthfi	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH
Fraksi PDU, 	Fraksi KKI, 	Fraksi PDKB, 	Fraksi TNI/POLRI, 	Fraksi UG, 	

**HASIL KESEPAKATAN
TIM KECIL PAH I BADAN PEKERJA MPR RI
Tanggal 13 September 2001**

Pasal 8

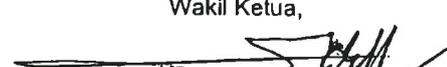
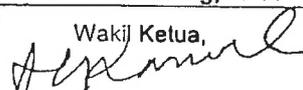
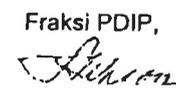
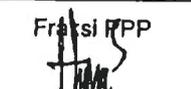
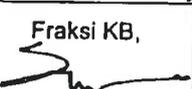
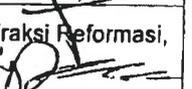
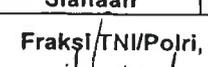
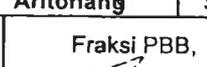
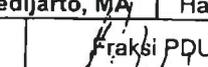
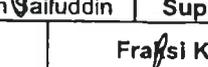
- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

(3) **Alternatif 1 :**

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya satu bulan setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Alternatif 2 :

Dalam hal terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu yang bersamaan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah masing-masing bertindak sebagai pelaksana tugas sementara Presiden dan pelaksana tugas sementara Wakil Presiden. Selambat-lambatnya satu bulan setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

PIMPINAN TIM KECIL PEMBAHASAN BAB III Pasal 8 RANCANGAN PERUBAHAN UUD 1945					
 Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si		Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		Sekretaris,  Drs. Ali Masykur Musa, M.Si	
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar,  Drs. Baharuddin Aritonang	Fraksi UG,  Prof. Dr. H. Soedjarto, MA	Fraksi PPP  Drs. Lokman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  Ir. Erman Suparno, MBA	Fraksi Reformasi,  Patrialis Akbar, SH
Fraksi TNI/Polri, 	Fraksi PBB, 	Fraksi PDU, 	Fraksi KKI, 	Fraksi PDKB, 